



Membaca Kebijakan Ketahanan Energi Presiden Prabowo Subianto: Perspektif Bonum Commune Thomas Aquinas

Ignasius Alvedo Hasan¹, Yohanes De Ngedu², Yakobus Christiano Gado Tonda Bei³

Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: hasanignasiusalvedo@gmail.com, rnggedu@gmail.com, jackbei266@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 12 Mei 2026

ABSTRACT

Energy security is a critical issue currently facing Indonesian society. As President Prabowo Subianto's administration begins, the implementation of energy security policies has become an urgent matter and a top priority. This is not merely to minimize domestic energy problems, but also as an effort to safeguard the nation's sovereignty and stability. For Prabowo Subianto, there are several fundamental reasons behind the creation of this policy, such as: the continuously rising domestic energy demand, the need for a transition to renewable energy, the national economy's lack of competitiveness in the global economic arena, dependence on energy imports, and an international political landscape increasingly devoid of constructive discourse. These challenges have spurred the nation's leader to implement energy security policies. This study aims to analyze energy security policies through the lens of Aquinas's concept of the common good (*bonum commune*), using a qualitative approach via a literature review. The findings indicate that the energy security policies established by President Prabowo Subianto are directed toward fostering the common good (*bonum commune*) for all Indonesian citizens.

Keywords: Common Good, Energy Security, President Prabowo Subianto, Thomas Aquinas.

ABSTRAK

Ketahanan energi merupakan isu krusial yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia pada saat ini. Memasuki masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, penerapan kebijakan ketahanan energi menjadi sesuatu yang urgen dan prioritas utama. Hal ini bukan semata-mata untuk meminimalisir masalah energi dalam negeri, namun sebagai upaya untuk menjaga kedaulatan dan stabilitas negara. Bagi Prabowo Subianto ada beberapa alasan yang mendasar lahirnya kebijakan ini, seperti: kebutuhan energi dalam negeri yang terus meningkat, kebutuhan transisi energi terbarukan, satabilitas ekonomi nasional yang kurang bersaing dalam kompetisi perekonomian internasional, ketergantungan pada impor energi, dan situasi politik internasional yang semakin minus diskursus. Problem-problem inilah yang membangkitkan semangat pemimpin negara ini untuk menerapkan kebijakan ketahanan energi. Penelitian ini hendak membaca kebijakan ketahanan energi menurut konsep *bonum commune* Aquinas, dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ketahanan energi yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto mengarah pada lahirnya kesejahteraan bersama atau *bonum commune* bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: *Bonum Commune, Ketahanan Energy, Presiden Prabowo Subianto, Thomas Aquinas.*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah salah satu negara di Asia dengan tingkat kepadatan penduduk atau *densitas demografi* terbesar keempat di dunia setelah India, Cina, dan Amerika Serikat. Dilansir dari UN Population Division organisasi PBB, mencatat data kepadatan penduduk di dunia berdasarkan urutan negara. Populasi penduduk terbesar di dunia rentang tahun 2025 - 2026 ditempati oleh lima negara yang dijabarkan sebagai berikut: India memiliki kepadatan penduduk 1,46-1,67 Miliar jiwa, Tiongkok mencapai 1,41-1,42 Miliar jiwa, Amerika Serikat mencapai 345-349 juta jiwa, Indonesia mencapai 283-287 juta jiwa, dan Pakistan dengan populasi 251-259 juta jiwa data ini dilansir dari data kepadatan penduduk (DKP). Populasi kepadatan penduduk ini menampilkan bahwa setiap tahun angka kelahiran semakin meningkat demikian pun dengan angka kematian.

Populasi penduduk yang semakin meningkat dalam suatu negara membawa dampak tersendiri dalam operasional negara tersebut. Dalam konteks negara Indonesia, kepadatan penduduk mengakibatkan peningkatan biaya konsumsi negara yang menyerap anggaran belanja negara (APBN) setiap tahun. Konsumsi negara yang paling besar dan tak terkendalikan adalah pemanfaatan energi bumi, terutama energi konvensional yang berasal dari fosil seperti minyak bumi dan batu bara. Konstitusi Indonesia terutama UUD 1945 pasal 33 ayat 1 sampai 5 telah mengatur mengenai pengelolaan sumber daya alam, perekonomian negara, dan sistem produksi yang berdasarkan nilai-nilai demokrasi (Ilham, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peran penting untuk menentukan kebijakan publik. Peningkatan biaya konsumsi ini tidak sejalan dengan efektifitas dan pemberdayaan suku cadang. Selain itu, pemanfaatan energi yang sama dapat meningkatkan pencemaran udara karena asap dan efek rumah kaca yang berujung pada pemanasan global dan menipisnya lapisan ozon.

Selain karena meningkatnya kepadatan penduduk yang menyerap energi melalui konsumsi bahan mentah, pemanfaatan energi juga sangat dibutuhkan untuk menunjang kemajuan teknologi perang dan persaingan militer global. Modernisasi peralatan militer dalam kompetisi internasional dan menjaga kredibilitas negara di mata global, dapat mengakibatkan krisis energi dalam negeri. Karena itu pemerintah mesti menyiasati hal ini dengan menerapkan strategis pertahanan energi yang terbarukan (EBT) (Subidyo, et al., 2025). Banyak para ahli berpendapat bahwa kesalahan penerapan strategis dari pemerintah dapat menimbulkan masalah kemiskinan struktural, sebagai akibat dari ketimpangan pengalokasian anggaran belanja negara (APBN).

Melihat realitas dan situasional yang di alami negara ini, penulis ingin menganalisis lebih holistik mengenai kebijakan ketahanan energi presiden Prabowo Subianto menurut konsep *bonum commune* Thomas Aquinas. Tesis utama dalam penelitian ini adalah: Apakah kebijakan ketahanan energi presiden Prabowo Subianto sejalan dengan harapan masyarakat Indonesia yaitu melahirkan kebaikan bersama dengan memenuhi kebutuhan energi dalam negeri? Harapan masyarakat

ini memiliki relevansi yang kuat dengan konsep *bonum commune* atau kebaikan bersama Thomas Aquinas. Thomas Aquinas adalah seorang teolog skolastik yang menjelaskan kebaikan bersama sebagai teleologi atau tujuan akhir dari sebuah permainan politik dalam negara (*polis*), akan tetapi tujuan tersebut tidak hanya berhenti pada tataran duniawi semata melainkan harus tertuju pada kebaikan yang tertinggi yaitu Allah sendiri sebagai *Summa Bonum* (Sandur, 2023).

Menurut Aquinas, hal pertama yang perlu dipahami di sini adalah kodrat dari politik itu sendiri. Thomas menemukan kodrat dari politik ketika ia mengetahui tujuan sebuah negara yang dipimpin oleh seorang pemimpin. Tujuan sebuah negara merupakan akumulasi dari tujuan pribadi setiap individu, karena individu merupakan esensi dari keberadaan negara itu sendiri. Thomas menerangkan bahwa, tujuan ini bukan semata-mata untuk seorang individu atau kelompok sosial tertentu, melainkan untuk mencapai kebaikan bersama (*Bonum Commune*) sebagai sesuatu yang. Konsep kebaikan yang diterima atau kebaikan bersama *bonum commune* dipandang sebagai yang lebih baik dan yang lebih ilahi daripada kebaikan untuk seorang individu tertentu (Aldo, 2025). Maka dari itu, Thomas Aquinas mengidealkan suatu negara sebagai *unity of others* bukan *the unity of essence*. Dalam *unity of others*, pribadi seseorang tidak lebur ke dalam suatu masyarakat sampai kehilangan individualitasnya atau membuat pribadinya 'kabur' melainkan ia terlibat secara proaktif bukan reaktif dalam membangun struktur sosial yang baik (Floyd, 2019).

Penelitian tentang kebijakan ketahanan energi presiden Prabowo Subianto telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Berikut dipaparkan beberapa penelitian terdahulu: *Pertama*, penelitian dari Risma Ayu. Penelitian ini memfokuskan pada masa depan energi terbarukan dari Indonesia setelah pelaksanaan kerjasama dalam proyek pembangunan hijau pada Belt and Road Initiative Green Development Coalition (BRIGC) dengan presiden Cina, Xi Jinping. Konsep teori yang digunakan yaitu teori kepentingan nasional menurut Jack Plano dan Roy Olton (Septutianingsih, 2025). *Kedua*, penelitian dari Ahmad Nurun.

Penelitian ini hendak membahas lebih spesifik mengenai analisis dinamika politik ketataannegaraan dalam mengimplementasikan kebijakan lumbung pangan dan hilirisasi energi berdasarkan konsep konstitusional. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep konstitusional dengan praktik implementasi, karena minimnya penerapan prinsip *checks and balance* pasca pemilu tahun 2024 (Nurun, 2025). *Ketiga*, penelitian dari Asep Iwa Soemantri, yang berfokus pada analisis mengenai isu pelanggaran wilayah negara Tiongkok di Zona Ekonomi Eksekutif Indonesia (ZEEI) di pulau Natuna. Penelitian ini melihat bahwa operasi TNI AL Indonesia di pulau Natuna dapat menyerap cadangan amunisi yang begitu signifikan, sehingga dapat mengganggu pelaksanaan tugas pokok dari TNI AL. Penelitian ini menggunakan teori logistik operasi dari Henry E Eccles. Hasil penelitian menunjukkan bahwa operasi TNI AL di kepulauan Natuna harus diimbangi dengan pengembangan industri pertahanan nasional (Soemanti et al., 2024).

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu *research gap* di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa ada tawaran akademik baru dalam penelitian ini. Penelitian

terdahulu hanya memaparkan kebijakan presiden Prabowo Subianto berdasarkan konsep hukum di Indonesia dan juga berdasarkan prinsip ekonomi, maka dalam penelitian ini penulis ingin menawarkan sebuah konsep teoritis yang baru. Penulis menggunakan konsep *bonum commune* Thomas Aquinas untuk membaca kebijakan ketahanan energi presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kepada semua akademisi dan masyarakat Indonesia bahwa tujuan akhir dari kebijakan presiden Prabowo Subianto adalah demi terwujudnya kebaikan bersama atau dalam bahasa teologi Aquinas disebut *bonum commune*.

METODE

Berdasarkan tema dan topik penelitian yang diangkat oleh peneliti, maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*literatur study*). Studi literatur yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, artikel teologi, dan sumber lain berhubungan dengan konsep Thomas Aquinas. Berpijak dari pemahaman ini, peneliti pada akhirnya menganalisa secara kritis konsep *bonum commune* dari Thomas Aquinas sebagai tujuan politik, untuk membaca kebijakan ketahanan energi pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Adapun prosedur penulisan mencakup pengumpulan data, pencatatan data, pengorganisasian data, dan pada akhirnya menganalisa data secara sistematis untuk menemukan relevansi data dengan tema penelitian yang diangkat penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan yang dijabarkan penulis di bawah ini merupakan hasil analisi yang mendalam agar menemukan titik temu antara kebijakan ketahanan energi sebagai tujuan politik presiden Prabowo Subianto, dan konsep *bonum commune* atau kebaikan bersama menurut Thomas Aquinas.

Thomas Aquinas: Selayang Pandang

Thomas Aquinas adalah seorang teolog abad pertengahan yang lahir pada tahun 1224/1225 di Lombardy tepatnya di Rossa Sicca Italia. Ia lahir dalam keluarga katolik yang sangat patuh terhadap ajaran, sehingga latar belakang keluarganya ini yang menentukan wawasan Aquinas dan perjalanan karir akademisnya di kemudian hari. Perjalanan akademisnya dimuali ketika Aquinas memilih masuk Ordo Dominikan pada tahun 1245. Thomas berkuliah di universitas Frederick II selama enam tahun, kemudian melanjutkan studinya di Paris. Selama di Paris pemikiran Aquinas mulai dipengaruhi oleh filsafat Aristotelian yang diarahkan oleh Albertus Magnus. Setelah dari Paris, Thomas kembali ke Roma dan berkontribusi dalam memberikan argumentasi filosofis dan teologis di Italia. Aquinas wafat pada usia lima puluh tahun di Biara Dominikan Fossanova – Italia pada tanggal 07 Maret 1274. Konsep teologisnya yang termuat dalam *summa teologiae* sangat dipengaruhi oleh filsafat Aristotelian memiliki pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan teologi dan sistem politik hingga saat ini.

Pemikiran Aquinas: Bonum Commune Sebagai Tujuan Politik

Konsep *bonum commune* Aquinas atau kebaikan bersama merupakan titik sentral dalam perkembangan filsafat politik. Prinsip *bonum commune* memiliki telos atau tujuan akhir yang paling sempurna yaitu menata sebuah negara (*polis*) untuk mencapai kebaikan bersama di atas kebaikan individu atau *privatio boni*. Problematikanya sangat tampak di mana negara dilema dalam menemukan titik temu antara kepentingan setiap individu. Realitas heteronegitas ini menuntut peranan pemerintah untuk memutuskan otonomi dalam percaturan politik yang terinstitusi.

Namun perlu disadari bahwa peran ini membutuhkan pertanggung jawaban yang sangat besar yaitu untuk menyatupadukan kepentingan setiap individu dan pada akhirnya menawarkan suatu konsep politik yang melahirkan keadilan sosial demi kebaikan bersama.

Konsep filsafat politik Aquinas pada dasarnya sejalan dengan politik Aristotelian yang menegaskan bahwa tujuan akhir atau (*Finis Ultimus*) dari suatu sistem politik dalam negara adalah menciptakan kebaikan bersama. Negara bertanggung jawab penuh untuk mensejahterahkan rakyatnya, namun konsep kesejahteraan itu harus bersifat kolektif agar dirasakan setiap orang bukan hanya bercokol pada kepuasan individu tertentu. Karena itu konsep *bonum commune* dipandang lebih baik dan lebih mulia (*Melius et Divinius*) dalam suatu penerapan sistem politik. Aquinas melihat bahwa konsep ini juga mencerminkan nilai etis dari sistem politik itu sendiri yang sedang terrealisasi dalam sebuah negara, bukan tanpa tujuan lain melainkan agar terwujudnya kesejahteraan secara komunal.

Prinsip dan Tujuan Kebijakan Ketahanan Energi

Energi merupakan kebutuhan dasar bagi manusia untuk menunjang kehidupannya. Penerapan kebijakan ketahanan energi memiliki latar belakang kondisi perekonomian di dalam negeri dan juga beban biaya konsumsi yang ditanggung negara. Persoalan ini bukan suatu hal baru, namun telah terjadi secara terus menerus seturut pertumbuhan dan perkembangan negara tersebut. Kebijakan ketahanan energi yang diterapkan pada masa pemerintahan presiden Prabowo Subianto sejatinya dilatarbelakangi kebutuhan dalam negeri yang semakin meningkat sementara ketersediaan bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas bumi, dan batubara semakin menipis. Selain alasan ini, kondisi geopolitik global juga semakin memanas karena peperangan antara Israel dengan negara Timur Tengah terutama Iran.

Menyiasati hal ini, presiden Prabowo Subianto menetapkan kebijakan ketahanan nasional dengan pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Kebijakan ini dinilai sebagai *guideline* bagi ketersediaan dan pemanfaatan energi. Beberapa tahun terakhir, pemanfaatan energi di Indonesia belum semaksimal mungkin. Karena Indonesia masih bertumpu pada pemanfaatan energi mentah seperti BBM atau Bahan Bakar Minyak yang diolah dari minyak mentah. Penggunaan BBM ini merata pada setiap sektor seperti sektor transportasi, operasional industri, bahkan sampai pada kebutuhan rumah tangga. Penggunaan BBM yang semakin meningkat dapat menyebabkan kehabisan suku cadang, kenaikan harga, hingga mengurangi devisa negara.

Setelah penulis membeberkan latar belakang kebijakan ketahanan energi presiden Prabowo Subianto, salah satu kebijakan yang telah terprogramkan oleh pemerintah adalah hilirisasi energi dan sumber daya mineral. Pada dasarnya hilirisasi merupakan proses mengolah bahan energi mentah menjadi bahan setengah jadi dan bahan jadi. Hal ini dilakukan pemerintah karena mempertimbangkan beberapa hal berikut: *pertama*, untuk mengurangi jumlah impor barang yang masuk ke dalam negeri, sebagai contoh impor LPG yang mencapai 6 – 7 juta ton/tahun. Pelaksanaan impor ini menanyakan kedudukan Indonesia yang katanya salah satu negara yang memiliki penghasilan batubara terbesar di dunia. *Kedua*, membuka lapangan pekerjaan dan menurunkan angka pengangguran di Indonesia. Lapangan pekerjaan sangat dibutuhkan pada zaman sekarang mengingat peningkatan kepadatan penduduk yang semakin naik setiap tahun. Karena itu masyarakat sangat membutuhkan ketersediaan lapangan pekerjaan dari pemerintah. Ketersediaan lapangan pekerjaan juga dapat menyumbang pendapatan perkapita (PDB) yang semakin naik dan pada akhirnya memperlancar pertumbuhan perekonomian Negara (Lubis, 2025).

Ketiga, meningkatkan kedaulatan energi dalam negeri. Program hilirisasi dari pemerintah sangat menentukan ketersediaan energi dan pemanfaatan energi yang berkelanjutan. Pemerintah mampu membaca dan menentukan biaya pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan energi, oleh karena itu energi baru dan terbarukan sejatinya memberikan sumbangan terbesar pada pertumbuhan perekonomian. Selain itu, penggunaan dan pemanfaatan energi ini mampu menciptakan rama lingkungan (Ilham, 2024). *Keempat*, menaikkan nilai ekspor barang. Pelaksanaan ekspor barang ke luar negeri dapat meningkatkan pendapatan dalam negeri, hal ini diperoleh melalui bea cukai. Karena itu hilirisasi bahan mentah dapat memperoleh keuntungan yang besar dan perekonomian Indonesia mampu menyaingi perekonomian global.

Melihat kebijakan hilirisasi ini dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian, maka pemerintah sangat mengotot agar hal ini dapat diimplementasikan dengan baik. Karena pada prinsipnya kebijakan dalam negeri berlandaskan pada faktor sosial, ekonomi, budaya, dan ideologi dari negara tersebut. Keberhasilan pelaksanaan program pemerintah tergantung dari kontribusinya yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia yang memiliki kebutuhan semakin meningkat. Selain itu program ini juga bertujuan untuk meningkatkan swasembada energi sebagai cara menghadapi ketegangan politik global yang semakin memanas.

Sintesis Kebijakan Ketahanan Energi Presiden Prabowo Subianto dan Pemikiran Aquinas

Kebijakan ketahanan energi yang diprogramkan presiden Prabowo Subianto memiliki nilai keuntungan yang sangat besar yang menciptakan sistem perekonomian yang harmonis dan kondusif dalam negeri. Selain itu penulis mengafirmasi bahwa kebijakan ketahanan energi memiliki dampak yang sangat signifikan bagi para pelaku ekonomi dalam kegiatan perekonomian. Melihat kebijakan ini dari konsep pemikiran Aquinas, maka hal ini sejalan karena dilakukan demi kebaikan bersama *bonum commune*. Kebijakan ini juga dinilai sebagai bentuk

permainan politik dari penguasa, yang pada dasarnya dilihat sebagai seni dalam pengabdian untuk mengupayakan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Aquinas melihat bahwa politik yang baik dan benar adalah suatu perjuangan untuk menciptakan kesejahteraan umum kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam suatu negara. Di sinilah yang menentukan moralitas politik yang bebas dari perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Selain itu melalui gagasannya, Aquinas juga melihat bahwa entitas kebaikan bersama akan terwujud dalam wajah para pemimpin yang sejati dengan mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan kelompok-kelompok tertentu. Hukum dan kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah harus berakar pada pelaksanaan orientasi moral publik dan rasional menuju kebaikan bersama sebagai kodrat dari politik itu sendiri.

Membaca kebijakan ketahanan energi Prabowo Subianto merupakan bentuk studi akademis yang paling urgen, karena kebijakan ini sejalan dengan konsep Aquinas tentang *bonum commune*. Integrasi antara pemikiran Aquinas dengan prinsip dasar kebijakan presiden Prabowo Subianto menawarkan suatu sistem penerapan politik yang baik dan bijaksana. Hal ini bukan semata-mata karena kepentingan pribadi dan haus validasi publik terhadap sistem pemerintahan yang sedang berlaku, melainkan sebagai suatu usaha untuk menciptakan kesejahteraan bersama dalam negeri ini.

SIMPULAN

Kebijakan ketahanan energi yang diprogramkan pada masa pemerintahan presiden Prabowo Subianto merupakan kebijakan yang sangat strategis karena sejalan dengan kondisi perekonomian Indonesia dan kondisi mineral dalam negeri. Selain itu kebijakan ini juga dipandang sebagai instrumen penting dalam menjaga kondisi perekonomian negara dalam persaingan pasar global. Melihat kebijakan ini dari pemikiran Thomas Aquinas tentang *bonum commune*, penulis sangat mendukung karena pada prinsipnya manifestasi dari kebijakan politik harus berdampak dan memiliki kontribusi besar terhadap kebutuhan masyarakat dalam negeri. Eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam merupakan bagian terpenting agar program ketahanan energi dalam negeri berjalan dengan lancar dan efisien. Oleh karena itu, bagi masyarakat, pemerintah juga menuntut partisipasi dari pihak swasta dan masyarakat pada umumnya agar pembangunan perekonomian di Indonesia berjalan dengan baik dan sejalan dengan prinsip dasar dari ekonomi Pancasila yaitu menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Aldo, Sebastianus, Bonifasius Bonifasius, Georgius Redwan, Maria Magdalena Husun, Yly Suardy Suardy, Roida Sihombing, and others, 'Spiritualitas Kepemimpinan Sebagai Pelayanan: Menuju Terwujudnya Bonum Commune', *Jurnal Education and Development*, 13 (2025), 469-75
- Floyd, Jonathan, *Filsafat Politik: Apa Dan Bagaimana* (Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2019)
- Ilham, Muhammad, 'Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Hukum

- Tata Negara Indonesia', *Indonesia of Journal Business Law*, 3 (2024), 1-7
- Lubis, Edwin S, 'Program Sawit Rakyat (PSR) Sebagai Akselerasi Swasembada Pangan Dan Energi', *Paspalum: Jurnal Ilmiah Pertanian*, 13 (2025), 210-26
- Nurun, Ahmad, 'Dinamika Politik Ketataannegaraan Dalam Transformasi Pangan Dan Energi', *Jurnal Andrew Law*, 4 (2025), 314-22
- Sandur, Simplesius, *Filsafat Politik Dan Hukum Thomas Aquinas* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2023)
- Septutianingsih, Risma Ayu, 'Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia : Menelisik Kepentingan Nasional Indonesia Dalam Aliansi Belt and Road Initiative Green Development Coalition (BRIGC)', *Jurnal Politik Indonesia*, 10 (2025), 80-103
- Soemantri, Asep Iwa, Irawan Didik Prabowo, and Kustianing Sekar, 'Analisis Efisiensi Ekonomi Terhadap Ketahanan Cadangan Amunisi Strategis Guna Menghadapi Operasi Tempur Laut Analysis of Economic Efficiency on The Resilience of Strategic Ammunition Reserves For Facing Marine Combat Operations', *Saintek: Jurnal Sains Teknologi Dan Profesi Akademi Angkatan Laut*, 3 (2024), 1-14
- Sudiby, Agus, Agung Nugroho, and Burhan Fazzry, 'Analisis Potensi Energi Baru Terbarukan Sebagai Energi Alternatif Pengganti Energi Fosil Di Wilayah Probolinggo Timur', *Jurnal Mema (Jurnal Mesin Dan Manufaktur)*, 2 (2025), 1-10